

**TRANSFORMASI
EKONOMI INDONESIA
MENUJU NEGARA MAJU
DAN BERDAYA SAING**

P E M I K I R A N

100

EKONOM

I N D O N E S I A

INDEF



Fajri Muharja, Ph. D adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Fajri menyelesaikan Studi Doktor bidang Ilmu Ekonomi (S3) di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2018. Sebelumnya, pernah mengikuti internship tentang pengelolaan kebencanaan pada Global Disaster Resilience Center –University of Huddersfield UK Tahun 2015. Fajri juga telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Andalas pada tahun 2000. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana di Thammasat University Bangkok Thailand Tahun 2009. Bidang ilmu yang ditekuni saat ini adalah berkaitan dengan Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Kebencanaan, dan Ekonomi Kelembagaan■

Covid – 19 dan Digitalisasi Ekonomi dan Momentum Transformasi Kebijakan Publik di Indonesia

Oleh

Fajri Muharja

Email: fajrimuharja@eb.unand.ac.id

Kebutuhan untuk melakukan transformasi kebijakan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dewasa merupakan perihai penting yang harus disegerakan. Mengingat, memasuki tahun 2024 nanti, bangsa ini akan lebih banyak lagi ditentukan oleh kiprah dari generasi milenial. Kehadiran Covid 19 sekarang merupakan sebuah koreksi dan tantangan terhadap sebuah kemandirian perekonomian bangsa baik di tingkat lokal, nasional dan konteks global. Begitu juga digitalisasi ekonomi merupakan sebuah jembatan yang harus digunakan untuk tetap membangun kemandirian di masa datang.

Sebuah kebijakan ekonomi yang harus dibangun semestinya perlu sekali memahami tempat hidupnya (*habitat*), agar capaiannya menjadi lebih berhasil guna dan berdaya guna. Tempat hidup yang dimaksud dalam hal ini adalah *habitat* perekonomian (*tempat hidupnya perekonomian*). Jika dirunut ke belakang, Lucas (1972) sebetulnya telah lama mendiskusikan adanya revolusi dari ekspektasi rasional dalam kebijakan makroekonomi dengan sebuah konsep *policy irrelevant*. Hal ini dapat dimaknai dalam kondisi kekinian bahwa semakin banyak informasi

yang diserap (*overload information*) dapat menimbulkan kebingungan bagi pengambil kebijakan dan masyarakat. Dengan asumsi *perfect information*, sebuah ide kebijakan pembangunan ekonomi dapat disampaikan kepada masyarakat dengan melakukan uji coba (*trial balloon*). Dimana hal ini berguna untuk melihat bagaimana sambutan masyarakat terhadap luarfa kebijakan yang diluncurkan.

Salah satu dampak dari sebuah kebijakan ekonomi yang terjadi selama ini adalah munculnya kemiskinan tetap terjadi sepanjang waktu. Pada dasarnya kemiskinan ini bukanlah disebabkan oleh bangsa ini kekurangan capital pembangunan. Namun, Ropke (1988) menyatakan bahawa permasalahan pembangunan ekonomi yang terjadi karena banyaknya hambatan budaya (*culture*) yang terjadi dalam masyarakat. Budaya indonesia cenderung belum mendidik generasi untuk melakukan perbuatan yang positif dan menganggap generasi muda akan membuat kekekeliruan.

Kemudian, perihal yang juga sangat esensial dalam pembangunan ekonomi adalah menghadirkan politik ekonomi (*political economy*) dalam sebuah kebijakan public (*public policy*). Faktor politik dalam sebuah kebijakan public (*public policy*) merupakan faktor besar yang menentukan. Sebenarnya, kehadiran teori ekonomi dalam mendesain dan mereformasi kebijakan dapat melakukan, namun memiliki sifat yang *silent*. Setidaknya dapat dipahami bahwa melakukan transformasi dan reformasi terhadap kebijakan public merupakan sebuah seni (*art*) yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan (*policy maker*). Perlu melakukan perhitungan kecukupan terhadap *political economic capital* agar transformasi ekonomi dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Covid – 19 dan Kebutuhan Kebijakan Ekonomi

Hadirnya pandemi Covid 19 di penghujung 2019 sampai sekarang memberikan bukti bahwa setiap bangsa butuh sebuah transformasi menuju kemandirian. Salah satu bentuk kemandirian itu terlihat dari pengelolaan bencana (*pandemic Covid 19*). Pandemi Covid 19 ini mampu menimbulkan krisis di semua sektor ekonomi. Dalam perspektif ekonomi kebencanaan (*disaster economics*) dipahami bahwa krisis yang terjadi saat ini membutuhkan pemulihan yang mengakar kepada bangsa. Semua bangsa merasakan dampak yang terjadi secara tiba-tiba dan sulit untuk diprediksi sebelumnya serta setiap bangsa menyelesaikan permasalahannya masing-masing. McKibbin & Fernando (2020) dan Surico dan Galeotti (2020) menjelaskan bahwa pandemi Covid

19 memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Covid 19 mengakibatkan terjadinya distrupsi pada sisi penawaran (*supply*). Kebijakan untuk melakukan pembatasan social berskala besar (PSBB) serta jaga jarak secara fisik (*psysical distancing*) berdampak terhadapnya *supply shock* berskala besar. Begitu juga di sisi permintaan agregat, menyebabkan terjadinya penurunan permintaan dan kenaikan harga.

Penangan Covid – 19 memerlukan optimisasi kebijakan yang bersifat dinamis dengan beragam keterbatasan yang berubah antar waktu. Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa kebutuhan kebijakan dalam situasi pandemi ini perlu mempertimbangkan kondisi dan aspek ketidakpastian yang berorientasi pada masa datang (*stochastic dynamic optimization*). Hasil optimasi ini dapat menghasilkan scenario dalam jalur waktu (*time path*) sebagai gambaran situasi dan kondisi lingkungan dalam melakukan aksi-aksi yang bersifat spesifik guna mencapai sebuah harapan. Situasi seperti inilah yang dihadapi baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Sebelumnya pemerintah telah fokus dalam kebijakan ekonomi dengan pemutus mata rantai Covid – 19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (tahap 1). Fase ini merupakan bentuk usaha penanggulangan krisis bidang kesehatan. Dalam periode tersebut juga disertai dengan pilihan kebijakan ekonomi (*economic policy choice*) adalah melakukan program tanggap darurat (*resque program*) dengan melakukan penyelamatan kepada kelompok masyarakat rentan terutama kelompok menengah ke bawah sebagai dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kelilangan usaha.

Dalam periode kenormalan baru (*new economic equilibrium*), Kebijakan pemulihan ekonomi (*reconomic recovery policy*) yang perlu dilakukan adalah pemulihan sektor-sektor ekonomi terdampak dan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memberikan relaksasi kredit perbankan serta relaksasi fiskal untuk memudahkan pembiayaan terhadap stimulasi perekonomian. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya gelombang krisis ekonomi dan keuangan.

Guncangan sisi penawaran (*supply shock*) juga memicu terjadinya gejolak permintaan. Ketidakpastian dari keberlanjutan pandemi Covid – 19 dan ketidakpastian kebijakan berdampak kepada keputusan industri dan rumah tangga dalam perekonomian. Sektor industri cenderung mengurangi pengurangan tenaga kerja. Kenyataan, selama PSBB pekerja tidak tetap terjadi kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Rumah tangga memiliki kecenderungan meningkatkan tabungan dalam rangka berjaga-jaga. Kondisi ini memberikan dampak kepada industri akan

mengalami kekurangan likuiditas karena kurangnya arus kas dari penurunan konsumsi rumah tangga.

Terjadinya keseimbangan baru perekonomian akibat kejutan Covid – 19 pada sisi penawaran dan permintaan. Hal ini memberikan dampak terhadap output yang berada lebih rendah dibandingkan kondisi sebelumnya. Jika perihal tersebut tidak dilakukan antisipasi melalui pilihan kebijakan ekonomi pemerintah (*policy choice*) dampaknya terhadap guncangan penawaran akan makin berbahaya terhadap perekonomian. Kejutan pada sisi produksi (*firm*) dan pada sisi konsumsi (*household*) sebagai dampak dari pandemi Covid – 19 diperkirakan terus berlanjut membentuk siklus baru dan berakumulasi terhadap penurunan kesejahteraan (*welfare*) dalam masyarakat. Meskipun Covid – 19 lebih awal mengejutkan sisi penawaran namun secara keseluruhan kejutan juga lebih besar terlihat pada sisi permintaan.

Semakin lama pandemi covid-19 berlangsung, maka kerugian yang dihadapi dalam perekonomian akan semakin besar yang terlihat dari semakin besarnya penurunan kesejahteraan sosial (*economic welfare*) melalui penurunan surplus produsen dan konsumen. Sejalan dengan pandangan beberapa literatur yang menyatakan bahwa kesehatan populasi berhubungan positif dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi (Pritchett dan Summer, 1996; Bloom dan Sachs, 1998; Bhargava et.al, 2001, Cuddington et.al, 1994; Cuddington dan Hancock, 1994; Robalino et.al, 2002a; Robalino et.al, 2002b; WHO Commission on Macroeconomics and Health, 2001; Haacker, 2004) dalam (McKibbin dan Fernando, 2020).

Secara empiris terlihat bahwa pandemi Covid 19 menimbulkan biaya ekonomi yang beragam. Ghurinchas (2020) mengestimasi biaya ekonomi dari Covid-19 dengan asumsi penurunan ekonomi bersifat sementara (*temporary*), ditemukan bahwa penurunan ekonomi terjadi sebesar 50% untuk satu bulan pertama dan 25% pada dua bulan berikutnya. Penurunan juga terjadi pada *Gross Domestic Product (GDP)* sebesar 10% dari GDP tahunan. Kebijakan pemerintah dalam bentuk PSBB dengan jangka waktu yang lebih lama berdampak terhadap penambahan penurunan permintaan dan penawaran, Biaya aktual terhadap perekonomian (jika tidak ada intervensi kebijakan) meningkat lebih besar dari 15% dari GDP. Kerugian output yang dihubungkan dengan great recession adalah 4,5% dan perekonomian masih belum akan segera pulih (Surico dan Galeotti, 2020). Jika wabah memberikan dampak jangka panjang, maka kerugian output akan terjadi dalam jumlah yang jauh lebih besar

Dalam jangka pendek, pandemi Covid 19 memberikan dampak yang juga beragam terhadap masing-masing sector ekonomi. Dcode (2020) memetakan, sektor ekonomi yang mengalami kontraksi (*losser*) sebagai dampak dari pandemic Covid – 19 adalah sector-sektor yang memiliki keterkaitan dengan *supply chain* dengan ekonomi global. Dalam kontek ekonomi global, sektor terdampak besar tersebut adalah pariwisata, transportasi udara dan laut, otomotif, konstruksi dan real estate dan manufaktur. Sedangkan sektor ekonomi yang cenderung mendapatkan manfaat (*gain*) adalah sektor penyediaan dan jasa kesehatan, proses penyediaan makanan (*food processing*) dan retail, perlindungan kesehatan personal, Informasi komunikasi teknologi (ICT), e-commer dan sector pertanian.

Kementrian Perindustrian RI (2020) melaporkan bahwa Covid-19 memberikan dampak terhadap sektor-sektor industri yang mengalami pukulan telak (*hit suffer*) (*losser*) seperti otomotif, kereta api, IKM & aneka, meuble dan kerajinan, besi baja, mesin, galangan kapal, kabel, keramik, elektronik dan peralatan komunikasi, peralatan listrik, semen, tekstil, pesawat terbang, regulator, dan alat berat. Sedangkan industri yang mengalami permintaan tinggi (*high demand*) adalah alat pelindung diri, farmasi, masker dan sarung tangan, makanan dan minuman, dan alat kesehatan. Tercatat juga bahwa, industry makanan dan minuma berkontribusi sebesar 32,4% terhadap PDB industry pengolahan (BPS, 2020). Industri tekstil dan pakaian berkontribusi sebesar 6,3% terhadap PDB Industri pengolahan. Sedangkan industry otomotif hanya berkontribusi sebesar 4,37% terhadap PDB industry pengolahan di Indonesia (BPS, 2020).

Digitalisasi Ekonomi

Digitalisasi ekonomi merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan dalam pemulihan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid 19. Pentingnya digitalisasi dalam ekonomi tidak terlepas dari dorongan adanya jaga jarak dalam masyarakat (*physical distancing*) dan juga digitalisasi saat ini merupakan sebuah *trend* perubahan secara global. Digitalisasi diperkirakan dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi dan kecepatan yang ditimbulkan dari segi waktu proses produksi. Digitalisasi merupakan sebuah respon terhadap perubahan perilaku konsumen kekinian. Digitalisasi ini seharusnya dapat meningkatkan daya saing ekonomi baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

Digitalisasi ekonomi dalam konsep dan definisi belum terlihat baku dalam konteks ilmu ekonomi. Digitalisasi merefleksikan perekonomian berdasarkan kepada waktu dan

kecenderungan (*trend*). Tapscott (1995) menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi adalah bentuk ekonomi baru yang memanfaatkan teknologi digital (*net*) dan *world wide web* (*web*) berdasarkan pada jaringan kecerdasan manusia (*networking of human intelligence*). Mesenbourg (2001) juga menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi memiliki tiga komponen utama yaitu: *e-business*, *infrastructure e-business*, dan *e-commerce*. Pemahaman berikutnya tentang digitalisasi ekonomi yang berkembang di negara-negara G20 (2016) bahwa hal tersebut merupakan berbagai kegiatan ekonomi yang mencakup penggunaan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor utama dalam berproduksi, dan jaringan informasi modern sebagai bagian kegiatan penting. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (2016) juga menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi merupakan pasar yang terbentuk oleh teknologi digital yang memfasilitasi perdagangan barang dan jasa melalui e-commerce. Deloitte (2019) mendefinisikan ekonomi digital sebagai “*the economic activity that results from billions of everyday online connections among people, businesses, devices, data, and processes*”.

Digitalisasi ekonomi memiliki beragam karakteristik yang juga dapat disebut sebagai new economy. Tapscott (1995) telah menyatakan karakteristik tersebut diantaranya: *Pertama*, Knowledge (pengetahuan digital), Digitization (proses digitalisasi transaksi ekonomi), Virtualization (merubah barang fisik menjadi barang virtual), dan Molecularization (light organization yang fleksibel). Kemudian, karakteristik berikutnya adalah Internetworking (jaringan internet untuk membentuk jaringan ekonomi) dan Disintermediation (transaksi dapat dilakukan langsung peer-to-peer). Karakteristik selanjutnya adalah Convergence (Konvergensi komputasi). Innovation, (Imaginasi dan kreativitas membentuk innovation economy), dan Prosumption (customer di information highway dapat juga menjadi produser). Berikutnya adalah Immediacy (kecepatan proses digital technology), Globalization (Tidak ada batas untuk transaksi global) dan yang terakhir adalah Discordance (jurang pemisah antara yang memahami teknologi dengan yang tidak memahami teknologi).

Beberapa kriteria dapat digunakan dalam menganalisis keberadaan digitalisasi ekonomi. Semjachkov (2017) menjelaskan ada 4 (empat) hal dasar yang dapat digunakan yaitu *employment sector*, *penetration rate*, *technology*, dan *the value factor*. Sektor tenaga kerja dapat dipahami bahwa proporsi penggunaan tenaga kerja di sektor produksi makin berkurang dan pada saat bersamaan terjadi peningkatan tenaga kerja di sektor jasa. Penetrasi artinya data dan jaringan yang menghubungkan berbagai sumber yang memberikan dampak terhadap ekonomi secara global.

Faktor nilai merupakan kondisi terkait pertumbuhan ekonomi dari data creation, transfer, processing, and storage. Digitalisasi ekonomi adalah *hardware*, layanan informasi, software dan telekomunikasi, namun skala digitalisasi ekonomi sebetulnya lebih luas termasuk kepada *e-business*, *e-commerce*, *industri 4.0*, *precision agriculture*, *Algorithmic economy*, *gig economy* dan sharing ekonomi.

Secara empiris, digitalisasi ekonomi memiliki peran besar dalam system pembayaran di tengah pandemik Covid 19. Auer (2020) menjelaskan bahwa media pembayaran tunai seperti uang kertas dan logam memiliki resiko sangat tinggi dalam penularan Covid 19 jika di bandingkan dengan media pembayaran non-tunai. Media pembayaran non tunai yang terbuka untuk public juga dapat menjadi tempat penyebaran Covid – 19. Seiring dengan perkembangan waktu, platform transaksi non tunai dapat dilakukan dengan *contactless* yang berbasis digital. UN Habitat (2020) meneliti dengan 180 responden, menemukan bahwa dengan teknologi digital dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan publik selama pandemic Covid – 19. Tantangan utama yang dihadapi dalam penggunaan teknologi digital adalah privacy, security, digital device, dan aksesibilitas. Kesempatan dalam mengembangkan digital selama pandemi Covid – 19 berupa tele-working, reducing digital device, ensure education learning dan promoting ecological transaction. Tingginya permintaan teknologi digital dalam perekonomian harus diiringi dengan respon inklusi terhadap masyarakat.

Membangun Transformasi Ekonomi Kewilayahan

Seperti yang dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, memahami habitat (tempat hidup) dari sebuah kebijakan ekonomi adalah perihal penting dalam melakukan transformasi ekonomi di masa datang. Mempertimbangkan aspek kewilayahan merupakan sebuah wujud dari membumikan berbagai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi yang memperhatikan faktor geografis dan demografi masyarakat. Luasnya jangkauan kewilayahan Indonesia dari Sabang sampai Merouke memperlihatkan sumberdaya dalam menghasilkan kebijakan ekonomipun berlimpah. Pertimbangan aspek geografis dan demografi merupakan modal utama dalam menghasilkan transformasi ekonomi yang lebih inklusif.

Resiko bencana baik itu dalam konteks bencana alam, pandemi dan gejolak sosial dalam masyarakat serta aksesibilitas wilayah yang memiliki variasi yang sangat besar merupakan sebuah ukuran yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Di samping itu, modal sosial

masyarakat meliputi *bounding*, *bridging*, *linking* dan *networking* yang ada dalam masyarakat merupakan sumberdaya besar yang dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan keputusan dan kebijakan ekonomi yang membumi dalam menyelesaikan beragam permasalahan.

KEPUSTAKAAN

- Auer, Raphael et.al. (2020). Covid-19, Chas, and the future of payments. Bank for International Settlement
- Bhargava, A. Dean T Jamison. Lauren J Lau. Cristopher J. L Murray (2001). Modeling the Effect of Health on Economic Growth. *Journal of Health Economics*. Vo. 20. Issues 3. Page 423-440.
- Bloom, D. E, Jeffrey D. Shachs, Paul Collier, & Christopher Udry (1998). Geography, Demography and Economic Growth in Africa. *Brookings Paper on Economic Activity*. Vol. 1998. No. 2. Page 207-295.
- Cuddington, J. T. and J. D. Hancock (1994). Assessing the Impact of AIDS on the Growth Path of the Malawian Economy. *Journal of Development Economics*
- Cuddington, J. T., J. D. Hancock, et al., 1(994). A Dynamic Aggregate Model of the AIDS Epidemic with Possible Policy Interventions. *Journal of Policy Modeling*
- Haacker, M., Ed (2004). *The Macroeconomics of HIV/AIDS*. IMF, Washington DC
- Kuncoro, A (2020). Kenormalan Baru sebagai Jangka Ekspektasi Positif. *Harian Kompas*, 9 Juni 2020.
- Lucas, R.E, Jr (1972). “Expectation and Neutral of Money” *Journal of Economics Theory* 4 (103-124).
- McKibbin, Warwick and Roshen Fernando (2020). *The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios*.
- McKibbin, Warwick J. (2006). *Global Macroeconomic Consequences of Pandemic Influenza*
- OECD (2013). *The Digital Economy*, OECD, Paris. <http://www.oecd.org/daf/competition/The-DigitalEconomy-2012.pdf>
- Princhett, L & Summer, L (1996). Wealthier and Healthier, *Journal of Human Resources*. Vol 31. Issues 4. 841- 868.
- Robalino, D. A., C. Jenkins, et al. (2002a). The Risks and Macroeconomic Impact of HIV/AIDS in the Middle East and North Africa: Why Waiting to Intervene Can Be Costly. *Policy Research Working Paper Series: 2874*, 2002. The World Bank.
- Robalino, D. A., A. Voetberg, et al., (2002b). The Macroeconomic Impacts of AIDS in Kenya Estimating Optimal Reduction Targets for the HIV/AIDS Incidence Rate. *Journal of Policy Modeling*
- Ropke, J (1988). *Kebebasan yang Terhambat: Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*. PT Gramedia – Jakarta

Sascha Kraus, Thomas Clauss, Matthias Breier, Johanna Gast, Alessandro Zardini, Victor Tiberius (2019). The economics of COVID-19: initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*. Emerald Publishing Limited 1355-2554 DOI 10.1108/IJEBr-04-2020-021

Semjachkov, K.A. (2017) Digital economy and its role in the management of modern socioeconomic relations. *Modern Management Technology*, 8 (80).

Surico, Paolo and Galeotti, Andrea (2020). The Economics of a Pandemic: the Case of Covid-19. LBS

Tapscott, D (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, McGraw-Hill, New York, NY.

UN HABITAT (2020). Digital Technologies and the COVID19 Pandemic. Briefing & Learning Note15.04, 2020. <https://www.uclg.org/sites/default/files/engbriefingtechnologyfinalx.pdf>